



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 020/SE/BAPPEDA/2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan kebijakan Asta Cita serta evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2025 serta berkelanjutan kinerja perangkat daerah tahun 2025.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 maka diharapkan adanya keselarasan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan visi dan misi Gubernur terpilih serta kebijakan Asta Cita yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

 Palembang, Desember 2025

KETUA DINAS,
Drs. H. KOIMUDIN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196912081996031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Sampai Dengan Triwulan I	6
2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3. Isu-isu Penting/Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	16
2.4. Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB IV. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	7
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan	13
Tabel 3	Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	19
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	29
Tabel 5	Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	33

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dokumen strategis tahunan yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjadi dasar penyusunan APBD. Namun demikian, dinamika nasional dan global sering kali menuntut perubahan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun.

Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam upaya menciptakan pembangunan daerah yang adaptif, terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, perubahan ini menjadi kebutuhan yang mendesak dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah perlu secara aktif dan responsif dalam menyusun perubahan RKPD sebagai bagian dari proses perencanaan yang dinamis.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ. Surat Edaran tersebut menginstruksikan perubahan RKPD dan APBD oleh pemerintah daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar tetap relevan dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Hal ini dilatarbelakangi dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga perlu memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sehubungan dengan

hal tersebut, maka perlu disusun perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan perangkat daerah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang .Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;
 16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
20. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 020/SE/BAPPEDA/2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengalami perubahan akibat dinamika kebijakan nasional, kondisi keuangan daerah, serta arahan strategis pemerintah pusat.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Menyesuaikan substansi program dan kegiatan perangkat daerah dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah disesuaikan.
2. Mengakomodasi perubahan kebijakan anggaran, Memastikan kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya serta Memberikan landasan teknis bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen anggaran berbasis perubahan.
3. Mendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memaksimalkan hasil pembangunan daerah melalui penyesuaian yang tepat terhadap arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan TW I, analisis capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab. IV. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I sebanyak 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan terlaksana dengan uraian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 10.571.892.402,- atau 22,42%. Capaian ini menunjukkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan aparatur dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sub kegiatan ini bersifat rutin dan wajib, sehingga realisasi anggaran pada awal tahun relatif tinggi dan tidak mengalami kendala pelaksanaan. Kondisi tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.

2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.37.020.000,- atau 10,89%. Capaian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional awal tahun dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN berupa pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan pada Dinas Kehutanan.

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Realisasi keuangan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.451.896.000,- atau 11,87%. Belanja difokuskan pada pemenuhan kebutuhan layanan dasar perkantoran yang bersifat rutin dan berkelanjutan berupa pembayaran honorarium non ASN pada Dinas Kehutanan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2025		Tingkat RealisasiTW I Tahun 2025 (%)	
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAEARAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	55,069,890,978	20.09	11,060,808,402	20.09	20.09
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	275,000,000	20.09	0	20.09	0
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100,000,000	1	0	50	0
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	175,000,000	2	0	14.29	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	47,603,336,700	20.09	10,608,912,402	20.09	22.29
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	339	47,163,336,700	339	10,571,892,402	100	22.42
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	340,000,000	0	37,020,000	0	10.89
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	8	100,000,000	0	0	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025 (%)	
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	50,000,000	20.09	0	20.09	0
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Pelaksanaan Pengamanan Aset SKPD	Laporan	1	50,000,000	0	0	0	0
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	120,000,000	0	0	0	0
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	50,000,000	0	0	0	0
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	70,000,000	0	0	0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	1,567,000,000	20.09	0	20.09	0
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	0	0	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	0	0	0	0
5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	0	0	0	0
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	150,000,000	0	0	0	0
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	75,000,000	0	0	0	0
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	12,000,000	0	0	0	0
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	100,000,000	0	0	0	0
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	900,000,000	0	0	0	0
5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	160,000,000	0	0	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2025		Tingkat RealisasiTW I Tahun 2025 (%)	
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	35,000,000	20.09	0	20.09	0
6.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	35,000,000	0	0	0	0
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	4,439,554,278	20.09	451,896,000	20.09	10
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	20,000,000	0	0	0	0
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	584,634,278	0	0	0	0
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3,834,920,000	2	451,896,000	16.67	11.78
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase (%)	100	980,000,000	20.09	0	20.09	0
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	680,000,000	0	0	0	0
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	150,000,000	0	0	0	0
8.3	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150,000,000	0	0	0	0
II	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rupiah (Rp); lokasi; Persentase (%); Hektar (Ha); Persentase (%)	Rp. 77.484.874.860 ; 61; 12,91; 10 ; 0,14	8,260,000,000	15.508.157.509;12;0,97;358,79;0,0211	0	20.01; 0;0;0	0
1	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rupiah (Rp)	Rp.77.484.874.860	6,075,000,000	15,508,157,509	0	20.01	0
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	2	6,075,000,000	0	0	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2025		Tingkat RealisasiTW I Tahun 2025 (%)	
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rupiah (Rp)	Rp.77.484.874.860	280,000,000	15,508,157,509	0	20.01	0
2.1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	130,000,000	0	0	0	0
2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Dokumen	2	150,000,000	0	0	0	0
3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha, Persentase (%)	10 ; 0,14	575,000,000	358,79;0,0211	0	100;15.07	0
3.1	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektare	20	500,000,000	0	0	0	0
3.2	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	8	75,000,000	0	0	0	0
4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	Lokasi; Persentase (%)	61;12,19	1,330,000,000	12;0,97	0	19.67;7.96	0
4.1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektare	200	200,000,000	0	0	0	0
4.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan	15	1,130,000,000	0	0	0	0
III	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Lokasi	61	100,000,000	12	0	19.67	0
1	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	Lokasi	61	100,000,000	12	0	19.67	0
1.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Kelompok	40	100,000,000	0	0	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah TW I Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2025 (%)	
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Kelompok	175	821,000,400	69	0	39.43	0
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	Kelompok	175	821,000,400	69	0	39.43	0
1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	20	70,000,000	0	0	0	0
1.2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	Kelompok	70	571,000,400	0	0	0	0
1.3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektare	5000	180,000,000	0	0	0	0
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Persentase (%)	0.14	50,000,000	0.0211	0	15.07	0
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha, Persentase (%)	10 ; 0,14	50,000,000	358,79;0,0211	0	100;15.07	0
1.1	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Lokasi Pembinaan Rehabilitas DAS	Lokasi	1	50,000,000	0	0	0	0

2.2. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan disajikan pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tutupan lahan (%)	-	-	18,8	N/A	-
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	-	-	0.25	0.91	-
3	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)	-	-	1,63	3.89	-
4	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	-	-	6	12.82	-
5	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	-	-	3	4.63	-
6	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	-	-	39,1	29.36	-
7	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	-	-	0,408	0.214	-
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emission (%)	-	-	1,81	0.5	-
9	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)	-	-	0,568	0.681	-
10	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)	-	-	3,092	3,092	-
11	Persentase luas lahan kritis yang Direhabilitasi (%)	-	-	0.13	0.71	-
12	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)	-	-	1.68	2.67	-
13	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	100	93.07	-
14	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	-	-	85/A	80.72	-

Dari tabel diatas diketahui analisis capaian per Indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Persentase Tutupan Lahan (%)

Target tutupan lahan sebesar 18,8% belum dapat dievaluasi karena data realisasi belum tersedia (N/A). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pemantauan tutupan lahan berbasis citra satelit dan updating data spasial secara berkala agar capaian indikator dapat diukur secara akurat.

2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)

Realisasi sebesar 0,91% melampaui target 0,25%. Hal ini menunjukkan sektor kehutanan dan sektor terkait mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, didukung oleh meningkatnya aktivitas produksi, pengelolaan hasil hutan, serta sinergi sektor kehutanan dengan pertanian dan perikanan.

3. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)

Realisasi 3,89% jauh melampaui target 1,63%, menunjukkan peran sektor kehutanan yang semakin signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Capaian ini mengindikasikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan serta meningkatnya nilai tambah dari kegiatan kehutanan.

4. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)

Realisasi 12,82% melebihi target 6%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan KTH, baik melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, maupun dukungan program kehutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

5. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)

Realisasi 4,63% melampaui target 3%, menandakan adanya peningkatan kapasitas usaha KUPS. Hal ini mencerminkan keberhasilan pendampingan usaha, diversifikasi produk, serta peningkatan akses pasar bagi kelompok usaha berbasis kehutanan.

6. Peningkatan Akses Legal Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial (%)
Realisasi 29,36% belum mencapai target 39,1%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kendala administratif dan proses verifikasi perizinan oleh Kementerian Kehutanan.
7. Persentase Kerusakan Hutan per Tahun (Deforestasi) (%)
Realisasi 0,214% lebih rendah dari target maksimum 0,408%, menunjukkan kinerja yang sangat baik. Penurunan deforestasi mengindikasikan efektivitas upaya pengamanan kawasan hutan, patroli, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hutan.
8. Penurunan Intensitas Emisi GRK menuju Net Zero Emission (%)
Realisasi 0,5% belum memenuhi target 1,81%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan, khususnya melalui rehabilitasi hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta integrasi program penurunan emisi lintas sektor.
9. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (Angka)
Realisasi 0,681 melampaui target 0,568, mencerminkan peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan konservasi dan perlindungan ekosistem di tingkat daerah.
10. Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)
Realisasi 3,092 sesuai dengan target 3,092, menandakan stabilitas kondisi keanekaragaman hayati. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan mampu menjaga keseimbangan biodiversitas.
11. Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (%)
Realisasi 0,71% jauh melampaui target 0,13%, menunjukkan keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan. Peningkatan ini didukung oleh kegiatan penanaman, rehabilitasi DAS, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
12. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)
Realisasi 2,67% melebihi target 1,68%, mencerminkan

keberhasilan pengendalian pemanfaatan lahan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai untuk menjaga fungsi ekologis dan mengurangi risiko bencana.

13. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)
Realisasi 93,07% belum mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan masih terdapat layanan yang belum optimal, yang perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan SOP, dan optimalisasi sarana prasarana pelayanan.

14. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)
Realisasi 80,72 masih berada di bawah target 85 (kategori A). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan agar sistem akuntabilitas kinerja semakin efektif dan terintegrasi.

2.3. Isu-isu Penting/Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan urusan kehutanan dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan penanganan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Salah satu isu utama adalah Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pembangunan New Pelabuhan Tanjung Carat yang merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sumatera Selatan.

Isu lainnya adalah perlunya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait pembagian kewenangan urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mempercepat penyesuaian dengan kondisi riil di daerah, terutama pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini selaras dengan isu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

Dinas Kehutanan juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dengan perlindungan kawasan sempadan sungai, yang berfungsi sebagai ekosistem penyangga dan zona konservasi. Alih fungsi lahan dan gambut, pemanfaatan lahan gambut yang tidak sesuai fungsinya dan

perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut. Selain itu, Kegiatan Pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal menjadi isu penting dalam memperkuat kebijakan berbasis masyarakat dan kolaboratif.

Berbagai isu strategis ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan kehutanan yang berorientasi pada kelestarian sumber daya hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan lingkungan hidup di masa depan. Isu strategis Dinas Kehutanan yang berhasil disimpulkan dari potensi daerah yang menjadi kewenangan, berbagai permasalahan, isu KLHS dan isu lingkungan yang dinamis, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Operasional FOLU NET SINK belum optimal dan Skema RBP Carbon di Provinsi Sumatera Selatan belum terkoordinir.
2. Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk Pelabuhan Tanjung Carat.
3. Penyelesaian penguasaan tanah melalui penataan kawasan hutan berupa permukiman, fasum, fasos dan lahan Garapan.
4. Penyelesaian keberadaan kebun sawit terbangun dalam kawasan utk korporasi dan masyarakat.
5. Alih fungsi lahan dan gambut yang tinggi akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukannya.
6. Pemanfaatan lahan gambut tidak sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana alam.
7. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan ancaman bencana kebakaran hutan di lahan gambut.
8. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan hutan secara legal yang belum optimal.
9. Laju Rehabilitasi tidak bisa menghadapi Laju Deforestasi sebagai kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan belum mampu mengurangi lahan kritis.

10. Peningkatan upaya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan rehabilitasi DAS di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melibatkan pihak swasta dan NGO.
11. Pelaksanaan Rehabilitasi DAS adalah kewenangan Kementrian Kehutanan, sehingga Dinas Kehutanan tidak memiliki kewenangan penilaian untuk menentukan hasil pelaksanaan kegiatan.
12. Sinkronisasi Pengelolaan DAS di Wilayah Kabupaten/kota belum optimal.

2.4. Reviu Terhadap RKPD Tahun 2025

Penyusunan rancangan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Pada Renja induk Dinas Kehutanan Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 17 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sedangkan pada perubahan Renja Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 44 subkegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KEHUTANAN				64,300,891.378	KEHUTANAN				72,218,050.306	
I	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	Rp. 77.484.874.860; 61 lokasi; 12,91%; 10 Ha; 0,14%	8,260,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0,45	10,774,832	
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	6,075,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	5,309,750	
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	6,075,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	5,309,750	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
1.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Prov. Sumsel	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Prov. Sumsel	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	0 Unit	-	
2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	-	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	280,000	
2.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	280,000	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	280,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya	Rp.77.484.874.860	153,770	
3.1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	130,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	74,975	
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	150,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	78,795	
4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	575,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	2,796,616	
4.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RTnRL	0 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	Prov. Sumsel	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RTnRL	1 Dokumen	200,000	
4.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	-	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	-	
4.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	500,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	26 Ha	1,005,722.5	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
4.4	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	75,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	900,000	
4.5	-	-	-	-	-	Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Prov. Sumsel	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	7 Ha	200,000	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6	-	-	-	-	-	Pembangunan Sumur resapan	Prov. Sumsel	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	5 Unit	37,268	
4.7	-	-	-	-	-	Pembangunan gully plug	Prov. Sumsel	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	6 Unit	66,404.8	
4.8	-	-	-	-	-	Pembangunan Dam Penahan	Prov. Sumsel	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	6 Unit	387,220.7	
5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	61 lokasi; 12,19%	1,330,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Patroli Pengamanan pada Kawasan Hutan dan Mangrove Secara Mandiri Maupun Terpadu; Persentase Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Pencegahan Karhutla	61 lokasi; 12,19%	2,031,196	
5.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0 Laporan	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	0 Laporan	-	
5.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	15 Laporan	1,130,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	15 Laporan	1,681,196	
5.3	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Prov. Sumsel	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	200 Ha	200,000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Prov. Sumsel	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	200 Ha	350,000	
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Rp. 77.484.874.860	-	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan	Rp. 77.484.874.860	153,500	
6.1	-	-	-	-	-	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Prov. Sumsel	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	15 laporan	153,500	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Perbenihan Tanaman Hutan		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0.14%	-	Perbenihan Tanaman Hutan		Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	0.14%	50,000	
7.1	-	-	-	-	-	Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Prov. Sumsel	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	2 laporan	50,000	
II	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	100,000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	70,200	
1	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	100,000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.	2 lokasi	70,200	
1.1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	2 kelompok	100,000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	2 kelompok	70,200	
1.2	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0 Ha	-	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Prov. Sumsel	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	0 Ha	-	
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	175 kelompok	821,000.4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	175 kelompok	2,549,543.3	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	175 kelompok	821,000.4	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan	175 kelompok	2,549,543.3	
1.1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	70 KTH	571,000.4	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Prov. Sumsel	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	45 kelompok	1,431,000	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Prov. Sumsel	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	70,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Prov. Sumsel	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	648,624	
1.3	Penyiapan Perhutanan Sosial	Prov. Sumsel	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	180,000	Penyiapan Perhutanan Sosial	Prov. Sumsel	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	469,919.3	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	0.14%	50,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan	0.14%	27,323	
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	50,000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Ha; 0,14%	27,322.6	
1.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0 Orang	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	0 Orang	-	
1.2	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0 Lembaga	-	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0 Lembaga	-	
1.3	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Prov. Sumsel	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50,000	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Prov. Sumsel	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	27,322.6	
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	55,069,890.978	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	58,796,152.406	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	275,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	235,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,000	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	175,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	135,000	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	47,603,336.7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	51,696,842.7	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 orang	47,163,336.7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	339 orang	51,296,882.665	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	340,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	279,960	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	100,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	120,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	50,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,000	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000	
3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	120,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	139,400	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-	
4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25,000	
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	70,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	114,400	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,567,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	2,579,015	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60,000	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,194,515.463	
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60,000	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000	
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75,000	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	12,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	79,500	
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100,000	
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	900,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	700,000	
5.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-	
5.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	160,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dishut	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	160,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	35,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	35,000	
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35,000	
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	4,439,554.278	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	3,180,894.278	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	20,000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	584,634	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	584,634.278	
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 laporan	-	
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,834,920	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2,576,260	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	980,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	830,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	680,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	680,000	

No.	Rancangan RKPD Induk					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan Renja)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	150,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishut dan UPTD KPH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	150,000	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishut / UPTD KPH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dishut / UPTD KPH	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan tahun 2025 pada Dinas Kehutanan Provisinsi Sumatera Selatan, dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi kegiatan-kegiatan tahun 2025 yang mendukung program stratregis Gubernur Sumatera Selatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan/Subk egiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
I	PENGELOLAAN HUTAN	10 UPTD KPH	Meningkatnya Produktivitas Kawasan Hutan; Mengurangi Kerusakan Hutan, Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya; Mengurangi Luas Lahan Kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan		
1	Pengelolaan Rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Tanjung Carat Kab. Banyuasin (UPTD KPH Wilayah III)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi		
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Tanjung Carat Kab. Banyuasin (UPTD KPH Wilayah III)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	9 UPTD KPH	Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan yang dilakukan Penanaman; Persentase Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		
2.1	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	9 UPTD KPH	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	36.22 Ha	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
II	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	7 UPTD KPH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan		
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	7 UPTD KPH	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Dilakukan Pendampingan Penguatan Kelembagaan		
1.1	Sub Kegiatan: Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	7 UPTD KPH	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	16 kelompok	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara pengelolaan sumber daya hutan dengan pencapaian program prioritas daerah.

Pertama, pada program prioritas Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, subkegiatan diarahkan pada pengelolaan rencana tata hutan KPH kewenangan provinsi serta koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan. Hal ini mencakup kegiatan inventarisasi kawasan hutan yang terdampak, penyusunan dokumen teknis rencana tata hutan, koordinasi lintas sektor dengan instansi pusat dan daerah, serta penyusunan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Subkegiatan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan pelabuhan strategis Tanjung Carat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap tata kelola kehutanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas ekspor dan impor komoditas unggulan.

Kedua, pada program prioritas Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) terdapat dua fokus kegiatan. Kegiatan pertama Adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan sub kePeningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Subkegiatan pertama adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan. Kegiatan ini mencakup penyelenggaraan pelatihan, pendampingan teknis kelompok tani hutan, penyuluhan lapangan terkait agroforestri dan konservasi lahan, serta fasilitasi komunikasi antarpenyuluh. Upaya ini mendukung kelanjutan program satu desa satu penyuluh pertanian dengan memperluas peran penyuluh kehutanan sebagai pendamping masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif berbasis hutan.

Subkegiatan kedua adalah Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Pembangunan Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan

penetapan lokasi lahan kritis, penyediaan dan distribusi bibit tanaman kehutanan dan MPTS kepada masyarakat, pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan, serta monitoring keberhasilan tumbuh tanaman. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hasil rehabilitasi, sekaligus meningkatkan produksi tanaman kehutanan dan komoditas lain yang bernilai ekonomi.

Dengan demikian, keseluruhan uraian subkegiatan tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara program prioritas pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan. Selain mendukung pembangunan infrastruktur strategis, subkegiatan juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan berbasis sumber daya hutan, sehingga diharapkan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Selatan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Kehutanan naik yang semula sebesar Rp. 64.300.891.378,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 naik menjadi Rp. 72.218.050.306,- ada kenaikan sebesar Rp. 7.917.158.928,-.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif dapat disajikan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	28				KEHUTANAN				72,218,050.306				65,534,455.033
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Prov. Sumsel	1,63%	10,774,832	DBH Sawit; DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1,86%	3,849,000
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan kawasan hutan	Prov. Sumsel	1 Dokumen	5,309,750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 Dokumen	276,000
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Prov. Sumsel	1 Dokumen	5,309,750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	1 dokumen	150,000
3	28	3	1.01	006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	-	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	140 Unit	126,000
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase KPH yang telah menyusun RPHJP	Prov. Sumsel	100%	280,000	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	100%	500,000
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Prov. Sumsel	4 Dokumen	280,000	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	14 Dokumen	500,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen pembinaan izin berusaha dan realisasi PNPB	Prov. Sumsel	2 Dokumen	153,770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 Dokumen	350,000
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Prov. Sumsel	2 Dokumen	74,975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 Dokumen	150,000
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Prov. Sumsel	2 Dokumen	78,795	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 Dokumen	200,000
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Prov. Sumsel	0,13%	2,796,616	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	0,14%	948,000
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RThRL	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun RThRL	Prov. Sumsel	1 Dokumen	200,000	DBH Sawit	-	-	-
3	28	3	1.04	xxx	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	0 Ha	-	DBH Sawit	-	20 Ha	300,000
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Prov. Sumsel	26 Ha	1,005,722.5	DBH Sawit; DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	10 Ha	240,000
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Prov. Sumsel	8 Laporan	900,000	DBH Sawit; Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 Laporan	150,000
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Prov. Sumsel	7 Ha	200,000	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Prov. Sumsel	5 Unit	37,268	DBH Sawit	-	2 Unit	50,000
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Prov. Sumsel	6 Unit	66,404.8	DBH Sawit	-	-	-
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Prov. Sumsel	6 Unit	387,220.7	DBH Sawit	-	-	-
3	28	3	1.04	xxx	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Prov. Sumsel	0 Ha	-	DBH Sawit	-	5 Ha	208,000
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	Prov. Sumsel	0,408%	2,031,196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	0,367%	1,775,000
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	Prov. Sumsel	15 Laporan	1,681,196	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	15 Laporan	1,375,000
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Prov. Sumsel	200 Ha	350,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	300 Ha	300,000
3	28	3	1.05	xxx	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Prov. Sumsel	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	15 Laporan	100,000
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Nilai produksi hasil hutan kayu	Prov. Sumsel	Rp.3.177.000.000	153,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Prov. Sumsel	15 laporan	153,500	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Prov. Sumsel	0,13%	50,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-		-
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Prov. Sumsel	2 laporan	50,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-
3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Prov. Sumsel	2 laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	Prov. Sumsel	3,092	70,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3,092	250,000
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Prov. Sumsel	0.471	70,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	0.471	250,000
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Prov. Sumsel	2 kelompok	70,200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	60 orang	150,000
3	28	04	1.03	xxx	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Prov. Sumsel	0 Ha	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	200 Ha	100,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Prov. Sumsel	6%;3%	2,549,543.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	8%;4%	1,360,000.0
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase KTH yang dibina dan difasilitasi	Prov. Sumsel	100%	2,549,543.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	1,360,000
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Prov. Sumsel	45 kelompok	1,431,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan: Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	50 Orang	800,000
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Prov. Sumsel	20 Orang	648,624	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 Lembaga	160,000
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Prov. Sumsel	5000 Ha	469,919.3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 Dokumen	400,000
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	Prov. Sumsel	1,68%	27,323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1,69%	345,000
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Prov. Sumsel	0,13%	27,322.6	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	0,14%	345,000
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Prov. Sumsel	1 Dokumen	27,322.6	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 Dokumen	75,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	28	06	1.01	xxx	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	0 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	50 Orang	150,000
3	28	06	1.01	xxx	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Prov. Sumsel	0 Lembaga	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 Lembaga	120,000
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat; Akuntabilitas Kinerja PD Daerah	Prov. Sumsel	100%; 85/A	58,796,152.406	Dana Alokasi Umum (DAU); DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%; 86/A	59,730,455.033
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Prov. Sumsel	100%	235,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	460,000
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	2 Dokumen	100,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 dokumen	150,000
3	28	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sumsel	14 Laporan	135,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	14 laporan	210,000
3	28	01	1.01	xxxx	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sumsel	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	8 laporan	100,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Prov. Sumsel	100%	51,696,842.7	Dana Alokasi Umum (DAU); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	49,593,172.055
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sumsel	339 orang	51,296,882.665	Dana Alokasi Umum (DAU); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	339 orang	49,053,172.055
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Sumsel	2 dokumen	279,960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3 dokumen	340,000
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Sumsel	8 Laporan	120,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 laporan	200,000
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Prov. Sumsel	100%	100,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	250,000
3	28	01	1.03	xxxx	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Sumsel	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 dokumen	75,000
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Sumsel	1 Dokumen	100,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 dokumen	105,000
3	28	01	1.03	xxxx	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Sumsel	0 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 laporan	70,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Prov. Sumsel	100%	139,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	489,363
3	28	01	1.05	xxxx	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prov. Sumsel	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	468 unit	351,000
3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Sumsel	12 Dokumen	25,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 Dokumen	75,000
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Sumsel	2 Orang	114,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 orang	63,362.978
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Prov. Sumsel	100%	2,579,015	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	2,279,000
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Paket	60,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 paket	120,000
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Paket	1,194,515.463	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 paket	170,000
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Paket	60,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 paket	110,000
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	2 Paket	150,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 paket	190,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Paket	75,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 paket	133,000
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Prov. Sumsel	2 jenis	79,500	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 dokumen	12,000
3	28	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Sumsel	12 Laporan	100,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 laporan	150,000
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sumsel	150 Laporan	700,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	200 laporan	1,200,000
3	28	01	1.06	xxxx	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prov. Sumsel	0 Dokumen	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	380 dokumen	94,000
3	28	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Prov. Sumsel	0 Dokumen	160,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1 dokumen	100,000
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Prov. Sumsel	100%	35,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	630,000
3	28	01	1.07	xxxx	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov. Sumsel	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	10 unit	350,000
3	28	01	1.07	xxxx	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Sumsel	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 unit	150,000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prov. Sumsel	1 Unit	35,000	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 unit	50,000
3	28	01	1.07	xxxx	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Prov. Sumsel	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	62 unit	80,000
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola Administrasi yang Terlaksana	Prov. Sumsel	100%	3,180,894.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	4,653,920.000
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Sumsel	12 laporan	20,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 laporan	30,000
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Sumsel	12 laporan	584,634.278	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 laporan	600,000
3	28	01	1.08	xxxx	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	0 laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 laporan	189,000
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Sumsel	12 laporan	2,576,260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	12 laporan	3,834,920

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Prov. Sumsel	100%	830,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100%	1,375,000
3	28	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Sumsel	22 Unit	680,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	38 unit	730,000
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Sumsel	50 Unit	150,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	65 unit	195,000
3	28	01	1.09	xxxx	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Sumsel	1 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3 unit	300,000
3	28	01	1.09	xxxx	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Sumsel	0 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2 unit	150,000

BAB V. PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen perangkat daerah dalam menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan agar tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan perencanaan dan penganggaran daerah, sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan capaian indikator, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan menunjukkan kinerja yang cukup baik, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, pengendalian deforestasi, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, terutama yang berkaitan dengan peningkatan akses legal perhutanan sosial, penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah ditetapkan secara konsisten, disertai dengan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah dirumuskan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Perubahan

Rencana Kerja Tahun 2025 dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Palembang, Desember 2025

KEPALA DINAS,



Drs. H. KOIMUDIN, S.H.,M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196912081996031001